

**STRATEGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN DI
DESA MARGO LESTARI
(Studi Pada KPH Gedong Wani, Lampung Selatan)**

(Skripsi)

Oleh

**ELFANI RACHEL SITUMORANG
NPM 2116041074**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STRATEGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM
PENANGANAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN DI
DESA MARGO LESTARI
(Studi Pada KPH Gedong Wani, Lampung Selatan)**

Oleh

**ELFANI RACHEL SITUMORANG
NPM 2116041074**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN DI DESA MARGO LESTARI (Studi Pada KPH Gedong Wani, Lampung Selatan)

Oleh

ELFANI RACHEL SITUMORANG

Konflik tenurial di kawasan hutan merupakan persoalan kompleks yang sering kali menghambat keberhasilan program perhutanan sosial. Di Desa Margo Lestari, Kabupaten Lampung Selatan, konflik muncul akibat ketidaksesuaian antara klaim legal negara dengan klaim sosial masyarakat yang telah secara turun-temurun menguasai dan mengelola lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dijalankan oleh KPH Gedong Wani dalam menangani konflik tenurial, dengan menggunakan teori implementasi strategi menurut Higgins yang mencakup tiga indikator: perencanaan integral dan sistem pengendalian; kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi; serta manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPH Gedong Wani dalam penanganan konflik tenurial masih bersifat situasional. Perencanaan operasional tidak sepenuhnya mengacu pada pedoman teknis, sementara sistem komunikasi internal cukup efektif, namun partisipasi pihak terkait dalam mediasi belum optimal. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah personel yang terbatas, minimnya pelatihan khusus penanganan konflik, dan ketiadaan tim khusus penanganan konflik menjadi hambatan signifikan. Selain itu, ketidaktersediaan anggaran turut memengaruhi efektivitas penanganan konflik. Konflik yang terjadi lebih mencerminkan konflik tenurial dalam aspek sosial, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan kelembagaan yang adaptif dan kontekstual terhadap dinamika lokal.

Kata kunci: konflik tenurial, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), strategi

ABSTRACT

STRATEGY OF FOREST MANAGEMENT UNIT IN HANDLING TENURIAL CONFLICT IN FOREST AREA IN MARGO LESTARI VILLAGE (Study at KPH Gedong Wani, South Lampung)

By

ELFANI RACHEL SITUMORANG

Tenurial conflicts in forest areas are complex issues that often hinder the success of social forestry programs. In Margo Lestari Village, South Lampung Regency, conflicts arise from a mismatch between the state's legal claims and the social claims of the community, who have traditionally controlled and managed the land. This study aims to analyze the strategies implemented by the Gedong Wani Forest Management Unit (KPH) in handling tenurial conflicts, using Higgins' strategy implementation theory, which includes three indicators: integral planning and control systems; leadership, motivation, and communication systems; and human resource management and organizational culture. This study uses a qualitative approach with a case study method through data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results show that the Gedong Wani Forest Management Unit's strategy in handling tenurial conflicts remains situational. Operational planning does not fully adhere to technical guidelines, while the internal communication system is quite effective, but the participation of related parties in mediation is not optimal. From a human resource perspective, limited personnel, minimal training specifically for conflict management, and the absence of a dedicated conflict management team are significant obstacles. In addition, the lack of budget also affects the effectiveness of conflict management. The conflicts that occur more reflect tenurial conflicts in the social aspect, so that handling them requires an institutional approach that is adaptive and contextual to local dynamics.

Keywords: *tenure conflict, forest management unit, strategy*

Judul Skripsi : STRATEGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN DI DESA MARGO LESTARI (STUDI PADA KPH GEDONG WANI, LAMPUNG SELATAN)

Nama Mahasiswa : Elfani Rachel Situmorang

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116041074

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19630206 198803 1 002

NIP. 19810628 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.

Sekretaris : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.

Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 07508212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 16 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Elfani Rachel Situmorang
NPM. 2116041074

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Elfani Rachel Situmorang yang lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 09 Mei 2003. Penulis merupakan putri ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak E.Situmorang dan Ibu R.Sidabutar. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Way Dadi, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung, yaitu Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berorganisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota Bidang Rumah Tangga Organisasi pada tahun 2022 sampai 2023 dan melanjutkan pada bidang Sumber Daya Organisasi pada tahun 2023 sampai 2024. Penulis juga aktif berorganisasi di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Unila dari tahun 2021 sampai 2023 sebagai anggota bidang Administrasi dan Perizinan.

Penulis pernah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Bina Desa Himagara *In Action* yang dilakukan di Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Bukit Batu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, penulis mengikuti magang di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung selama 6 bulan pada tahun 2024.

MOTTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan.”

Yeremia 17 : 7

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku”

Filipi 3 : 13

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

Amsal 23 : 18

“Jika bukan Tuhan yang menjaga hidupku, Sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan, Kusadar semua karena cintaMu, Kuakui semua karena berkatMu, Tak mungkin semua tanpa campur tanganMu, Takkan usai kasih sayangMu, Takkan usai kasih setiaMu Tuhan”

Prince Poetiray – Karena CintaMu

“I am grateful that my life is in Your hands and because I have the Lord Jesus, I will be okay”

Elfani Rachel S

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan kemurahan-Nya yang tercurah, perlindungan-Nya, penyertaan-Nya, dan memberkati dalam berbagai hal serta memberikan semua indah pada waktunya. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Edypolo Situmorang dan Ibu Rosdiana Sidabutar

Terimakasih telah memberikan limpahan kasih sayang, kesabaran, dukungan, doa, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Terimakasih telah mengusahakan apapun untuk mengiringi penulis dalam menyelesaikan pendidikan sampai sarjana ini dengan baik dan selalu mendukung apapun yang dilakukan.

Ketiga Saudara Kandungku Tersayang, Abang, Kakak, dan Adikku

Abang Benny, Kak Ririn, dan Mordekhai

Terimakasih atas kebersamaan, semangat, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Keponakanku, Drevan dan Irene

Terimakasih selalu membangkitkan suasana hati melalui kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan menjadi sumber keceriaan.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Penanganan Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Di Desa Margo Lestari (Studi Pada KPH Gedong Wani, Lampung Selatan)”** dengan baik sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 Administrasi Negara di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., terimakasih telah menjadi dosen pembimbing akademik yang mendampingi dan memberikan penulis nasihat, masukan, arahan, dan motivasi selama perkuliahan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta masukan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku dosen pembimbing kedua yang senantiasa membimbing penulis selama penulisan skripsi ini. Terimakasih atas saran, masukan, dukungan, motivasi, dan ilmu yang diberikan terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembahas dan penguji. Terimakasih atas segala saran dan kritik yang bermanfaat untuk melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan yang terdapat pada penulisan skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung periode 2021-2025.
7. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung periode 2021-2025.
8. Ibu Susana Indriyati, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung periode 2025-2030.
9. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Staf Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, terimakasih atas semua bantuan dan arahan yang telah diberikan baik dalam urusan administrasi semasa perkuliahan maupun hingga menuju tahap akhir perkuliahan ini.
11. Seluruh informan penelitian terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan ilmu serta informasi untuk membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
12. Seluruh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang telah memberikan pengalaman dan ilmu baru yang berharga bagi penulis selama magang dan membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
13. Bapak dan Mama, terimakasih atas semua yang sudah diberikan, terimakasih sudah mendukung baik dalam doa ataupun motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan dibangku perkuliahan, Putri Della, Febby Sarumaha, dan Wulandari Safitri, terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui bersama sejak awal perkuliahan ini. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan semua hal baik yang diberikan kepada penulis.
15. Saudara dalam Tuhan, Ana Maria, Rahel, Febby, There, Naomi, dan Miranda. Terimakasih atas kebersamaan yang sudah dilalui, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.

16. *Chill Society*, Nur Anisa, Wulan, Dila, Alin, dan Amel. Terimakasih telah menjadi sahabat sampai masa akhir perkuliahan ini. Terimakasih atas waktu, dukungan, tenaga, keceriaan, semua cerita suka dan duka, dan atas semua hal yang kita lalui bersama. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dengan memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini, serta telah menemani penulis untuk turun penelitian. Terimakasih telah berkumpul menjadi satu dari berbagai asal tempat tinggal, kelas, ataupun divisi kepanitian masing-masing sehingga perjalanan perkuliahan ini lebih berwarna. Mengudaralah yang jauh.
17. Haha-Hihi, PJ Maba 21, Nur Anisa, Ayu Nadila, dan Naufal Alfarisi, terimakasih atas kerja sama, bantuan, pengalaman, kekompakan, dan hal-hal baru yang kita lalui. Kita berhasil melalui badai angin ribut pada masa itu, dengan rasa lelah dan tekanan yang muncul, namun masih ada ruang tawa yang masih tersisa untuk menguatkan kita dan menjadikan memori kenangan yang selalu ada dalam ingatan ini. Bukan sebatas menjadi *partner* dalam kepanitian tetapi menjadi mba dan abang yang menemani penulis dalam setiap ketidaktahuannya hingga sampai masa perkuliahan ini berakhir.
18. Presi yang terceraiberai, Rizki Amelia, Afif Aulia, Syifa Melandri, dan Gery Geraldo, serta teman-teman panitia Wismagara 21 lainnya, terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk bergabung dalam pengalaman hidup yang paling melelahkan dan cukup panjang ini.
19. Semua teman-teman Gilgamara angkatan 2021, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan, melewati semua proses perkuliahan ini dengan baik.
20. *Successful People*, Dina Saripa, Ruth Apriliana, Theresia Maharani, Inggrid Anggraeni, dan Marcela Aulia, terimakasih telah menemani penulis sejak masa SMP hingga sampai saat ini, terimakasih atas dukungan, cerita suka dan duka, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
21. *Ngabski*, Bening, Cahaya, Cheryl, Dewi, Feriska, Hilwah, Navra, dan Ruth, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

22. *Last but not least*, teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih tidak pernah menyerah serta tetap mau mencoba dan melewatinya walaupun itu sulit. Tuhan sudah merancangkan semuanya yang terbaik dan akan diberikan indah pada waktunya.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025

Penulis,

Elfani Rachel Situmorang

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR ISTILAH	v
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Manajemen Strategi	13
2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi	13
2.2.1 Proses Manajemen Strategi	14
2.2.2 Implementasi Strategi.....	15
2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	18
2.4 Konflik tenurial	20
2.5 Kerangka Pikir	21
 III. METODE PENELITIAN	 23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.7 Keabsahan Data.....	29

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum	32
4.1.1 Profil dan Sejarah Singkat Desa Margo Lestari	32
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Margo Lestari.....	32
4.1.3 Objek Lahan yang menjadi Konflik	33
4.1.4 Profil KPH Gedong Wani	34
4.1.5 Batas Wilayah KPH Gedong Wani	35
4.1.6 Visi Misi KPH Gedong Wani	36
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian.....	37
4.2.2 Kepemimpinan, Motivasi, dan Sistem Komunikasi.....	49
4.2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi.....	55
4.2.4 Faktor penghambat dalam implementasi strategi penanganan konflik tenurial Di Desa Margo Lestari yang dilakukan oleh KPH Gedong Wani ...	64
4.3 Pembahasan.....	67
4.3.1 Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian.....	67
4.3.2 Kepemimpinan, Motivasi, dan Sistem Komunikasi.....	71
4.3.3 Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi.....	78
4.3.4 Faktor penghambat dalam implementasi strategi penanganan konflik tenurial Di Desa Margo Lestari yang dilakukan oleh KPH Gedong Wani ...	83
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pemegang Izin Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani.....	4
2. Penelitian Terdahulu	11
3. Jadwal Penelitian.....	24
4. Daftar Informan.....	26
5. Objek Penelitian	27
6. Daftar Dokumen.....	28
7. Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2019-2024	37
8. Matriks Hasil Penelitian Strategi KPH Gedong Wani dalam Penanganan Konflik Tenurial di desa Margo Lestari	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Target dan Realisasi Kasus Penanganan Konflik Tenurial di Indonesia (Dalam Kasus).....	2
2. Peta Wilayah Konflik.....	6
3. Kerangka Pikir	22
4. Peta Kawasan KPH Gedong Wani berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020.....	35
5. Pedoman Teknis Penanganan Konflik Tenurial Dalam Areal Perhutanan Sosial	40
6. Proses Mediasi di Desa margo Lestari	42
7. Proses Mediasi di Lahan Konflik	44
8. Surat Permohonan Penyelesaian Konflik Tenurial di Desa Margo Lestari	45
9. Peningkatan kapasitas dan Penyegaran Penyuluh.....	58
10. Kegiatan Diskusi Uji Coba Modul Penandaan Batas Sederhana dan Praktek Penandaan Batas pada Areal PS.....	59
11. Pembinaan Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	59

DAFTAR ISTILAH

Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut)

Organisasi yang dibentuk dari beberapa Kelompok Tani hutan (KTH) yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di bidang kehutanan.

Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kumpulan petani hutan masyarakat lokal yang berperan dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di bidang kehutanan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Unit pelaksana teknis daerah Dinas Kehutanan, wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dalam hal ini KPH Gedong Wani yang mengelola kawasan hutan di Desa Margo Lestari.

Konflik Tenurial

Bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.

Perhutanan Sosial

Sistem Pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Polisi Kehutanan (Polhut)

Pejabat fungsional dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah yang bertugas sebagai garda terdepan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Register

Register merujuk pada kawasan hutan milik negara yang pengelolaannya didasarkan pada penomoran urut dalam sistem administrasi kehutanan.

Strengthening of Social Forestry (SSF) Project

SSF Project merupakan proyek kerja sama hibah antara *Global Environment Facility* (GEF) yang disalurkan melalui *World Bank* dengan Pemerintah Indonesia, dan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proyek ini bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pencapaian target program nasional Perhutanan Sosial.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang melimpah dengan luas kawasan hutan mencapai 125.795.306 Ha dengan panjang batas 373.828,44 km yang terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Luasnya area dan beragam fungsi ekologis serta ekonomis menjadikan pengelolaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dengan tetap menjaga kelestariannya. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestariaannya, pengelolaan hutan harus dilakukan secara efektif dan dimanfaatkan secara bijaksana. Namun, pengelolaan kawasan hutan sering kali dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah konflik tenurial. Konflik tenurial merupakan bentuk perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara berbagai pihak yang mengklaim perebutan atau penguasaan hak kepemilikan, penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan hutan. Sebanyak 86,44 % kawasan hutan di Indonesia telah digarap oleh masyarakat yang berpotensi memicu konflik tenurial di antara masyarakat lokal yang menetap dan memanfaatkan lahan serta sumber daya di sekitar hutan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2024).

Konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi karena klaim terhadap lahan sebagai tanah adat yang diwariskan oleh leluhur dan dijadikan alasan untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai areal permukiman, jalan, sawah, ladang, dan kebun (Dassir, 2008). Ketidaksepakatan mengenai batas-batas kawasan hutan antara masyarakat dan pemerintah juga pemicu konflik (Sylviani & Hakim, 2014). Pembangunan pertanian, perkebunan serta pemukiman menyebabkan degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia sebagai dampak dari konflik ini (Nuraeny dkk., 2023).

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melaporkan sebanyak 1.051 kasus konflik tenurial yang terjadi sepanjang tahun 2015 sampai 2022 dan hanya 324 kasus atau sekitar 31% dari kasus tersebut berhasil diselesaikan (*cnnindonesia.com*, diakses 21 Oktober 2024). Jumlah konflik yang belum diselesaikan menunjukkan bahwa terdapat masalah besar dengan kebijakan pengelolaan hutan, koordinasi antar stakeholder, dan metode untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, hal ini menunjukkan betapa kompleksnya konflik tenurial yang seringkali melibatkan kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang saling bertentangan, serta ketidakpastian status lahan karena klaim kepemilikan dan perizinan yang saling bertentangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan hutan.



Gambar 1. Target dan Realisasi Kasus Penanganan Konflik Tenurial di Indonesia (Dalam Kasus)

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Berdasarkan grafik pada gambar 1, menunjukkan bahwa target dan realisasi kasus penanganan konflik tenurial pada tahun 2020–2023 mengalami peningkatan yang dapat diamati dari semakin tingginya kasus tertangani pada setiap tahun. Capaian realisasi yang melebihi target setiap tahun mengindikasikan adanya ketimpangan antara perencanaan administratif dan kompleksitas konflik tenurial yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Fakta bahwa realisasi selalu melampaui target setiap tahun tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan mutlak, melainkan dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa jumlah konflik aktual di lapangan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan atau diakomodasi dalam perencanaan awal. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik tenurial tidak hanya ada tetapi juga meningkat di beberapa tahun terakhir dan peningkatan jumlah kasus tertangani

secara langsung mencerminkan peningkatan jumlah konflik tenurial yang terjadi di lapangan.

Konflik tenurial tidak hanya terjadi di tingkat nasional, akan tetapi juga menjadi isu yang cukup serius di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Beberapa kasus konflik tenurial dalam kawasan hutan terjadi di Provinsi Lampung yang dapat ditelusuri melalui penelitian-penelitian terdahulu, antara lain penelitian yang dilakukan terhadap konflik yang terjadi di kawasan register 45 Kabupaten Mesuji antara masyarakat dengan PT. Silva Inhutani Lampung yang belum menemukan penyelesaian akhir mengenai hak klaim tanah (Selviani dkk., 2017), bahkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang luka tembak (*web.lintaslampung.com*, diakses 27 Oktober 2024). Selain itu, terdapat penelitian mengenai konflik tenurial yang terjadi di register 38 yang berada di Gunung Balak Lampung Timur, konflik ini disebabkan adanya perambahan kawasan hutan lindung antara masyarakat lokal, masyarakat pendatang, dan pemerintah (Yusrizal, 2022). Kemudian diperjelas melalui *website agroindonesia.co.id* bahwa konflik berkepanjangan ini diduga terjadi karena kurangnya konsistensi dan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaiannya, meningkatnya tekanan kebutuhan lahan dari masyarakat, serta adanya perlakuan diskriminatif dari aparat.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan melalui kebijakan Perhutanan Sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial tepatnya pada Pasal 153 ayat (1) dinyatakan bahwa “Penanganan konflik tenurial kawasan hutan dapat diselesaikan melalui perhutanan sosial”. Kebijakan ini memberikan akses legal kepada masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, terutama yang sudah mengelola areal selama minimal 5 tahun terakhir atau secara turun-temurun. Akses ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan melalui berbagai skema seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan,

keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi salah satu solusi dalam mengatasi konflik tenurial di kawasan hutan karena kebijakan ini membawa manfaat berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat hutan. Pernyataan ini juga didukung oleh Abimanyu (2023), bahwa kebijakan perhutanan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dapat menjadi mekanisme efektif untuk penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup luas. Kabupaten ini memiliki kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Gedong Wani. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Gedong Wani merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional di bidang pengelolaan hutan sesuai wilayah kerja dan wilayah administratif. Areal kerja KPH Gedong Wani secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Gedong Wani berperan sebagai pelaksana dalam kebijakan perhutanan sosial yang berusaha untuk menangani permasalahan konflik tenurial dengan tujuan memastikan semua fungsi dan layanan hutan di wilayah tetap berjalan dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan dengan baik melalui program-program yang ada.

Tabel 1. Daftar Pemegang Izin Perhutanan Sosial KPH Gedong Wani

NO PEMEGANG IZIN	NO DAN TANGGAL SK	DESA/KEC/KAB	LUAS (HA)
HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)			
1 Gapoktan Karya Muda	SK. 220/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2017, tanggal 27 Januari 2017	Jati Baru Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan	822
2 Gapoktan Gemah Ripah	SK. 223/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2017, tanggal 27 Januari 2017	Sinar Ogan Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan	273
3 Gapoktan Tani Maju	SK. 224/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2017, tanggal 27 Januari 2017	Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan	1.637
4 Gapoktan Jati Rukun	SK. 221/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2017, tanggal 27 Januari 2017	Jati Indah Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan	62
5 Gapoktan Jaya Abadi	SK. 222/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2017, tanggal 27 Januari 2017	Srikaton Kec. Tanjung Bintang, Lampung Selatan	714
KEMITRAAN KEHUTANAN			
6 KTH Agro Sumber Rezeki	SK.8165/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2020, tanggal 30 Desember 2020	Sidoharjo, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan	24

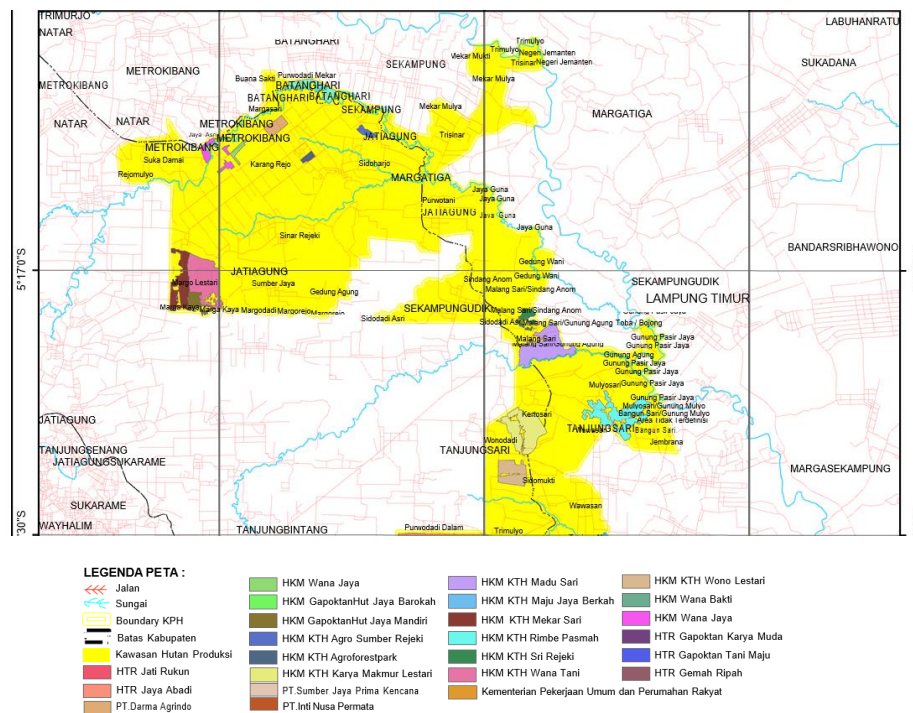
NO	PEMEGANG IZIN	NO DAN TANGGAL SK	DESA/KEC/KAB	LUAS (HA)
7	KTH Agro Forest Park	SK.7453/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2020, tanggal 14 Desember 2020	Karang Rejo, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan	17
8	Gapoktan Wana Jaya	SK.1702/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, tanggal 31 Maret 2021	Marga Jaya, Kec. Metro Kibang, Lampung Timur	74
9	Gapoktan Wana Bakti	SK.1708/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, tanggal 31 Maret 2021	Desa Purwodadi Mekar, Kec. Batanghari, Lampung Timur	80
HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)				
10	KTH Rimbe Pasmah	SK.8508/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021, tanggal 24 Desember 2021	Mulyosari Kec. Tanjung Sari, Lampung Selatan	242,88
11	Gapoktan hut Jaya Mandiri	SK.10280/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Margo Lestari, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan.	47
12	KTH Mekarsari	SK.10285/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Margo Lestari, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan.	144
13	KTH Wana Tani	SK.10295/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Margo Lestari, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan.	235
14	Gapoktan hut Wana Barokah	SK.10298/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Triharjo Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan.	302
15	KTH Maju Jaya Berkah	SK.10297/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Tanjung Harapan Kec. Merbau Mataram, Lampung Selatan.	49
16	KTH SriRejeki	SK.10287/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Malang Sari Kec. Tanjung Sari, Lampung Selatan	41
17	KTH Wono Lestari	SK.10245/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari, Lampung Selatan.	122
18	KTH Karya Makmur Lestari	SK.10247/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Kertosari Kec. Tanjung Sari, Lampung Selatan.	224
19	KTH Madu Sari	SK.10282/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022	Malang Sari Kec. Tanjung Sari, Lampung Selatan.	245
TOTAL				5.113,35

Sumber: RPHJP KPH Gedong Wani Provinsi Lampung Tahun 2024-2033

Dari data tabel 1 dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2024, terdapat 19 (sembilan belas) izin Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kepada masyarakat desa yang berada pada areal kerja KPH Gedong Wani yang terdiri dari izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 5 (lima) unit, izin Kemitraan Kehutanan sebanyak 4 (empat) unit dan izin Hutan Kemasyarakatan sebanyak 10 (sepuluh) unit. Hal ini mencerminkan pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, penerapan perhutanan sosial ini masih belum menjadi solusi efektif dalam menghentikan konflik pengelolaan hutan karena konflik masih terjadi sesudah diberikan izin kepada masyarakat (Nuraeny dkk.,

2023). Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, konflik tenurial masih ditemukan setelah adanya izin perhutanan sosial bahwa dalam areal kerja Gedong Wani masih ditemukan konflik tenurial yang terjadi yaitu di Desa Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini termasuk dalam kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Gedong Wani dan dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.



Gambar 2. Peta Wilayah Konflik

Sumber: RPHJP KPH Gedong Wani Provinsi Lampung Tahun 2024–2033

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa areal yang menjadi objek konflik diberi warna cokelat tua, di mana lahan tersebut diberikan izin perhutanan sosial bagi Kelompok Tani Hutan yang bernama KTH Mekar Sari dan terletak di desa Margo Lestari. Konflik ini terjadi antara masyarakat yang mengklaim kawasan hutan tersebut miliknya yang didapat secara turun-temurun dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Sari. Masyarakat yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya yang didapat dan dipercayakan kepadanya sedangkan pihak Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Sari mengklaim lahan tersebut berhak dikelola oleh kelompok dikarenakan adanya izin pemanfaatan kawasan hutan dengan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.

Konflik ini bermula ketika lahan pada awalnya dimiliki masyarakat setempat, namun kepemilikannya secara bertahap berpindah tangan dari waktu ke waktu hingga diturunkan secara turun-temurun. Masyarakat tersebut kemudian memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk mengelolanya. Ketika dilaksanakan sosialisasi kebijakan perhutanan sosial, pihak yang terkait diundang untuk hadir, namun tidak memberikan konfirmasi kehadiran. Hal ini diduga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kemungkinan pengambilalihan lahan setelah mengikuti kebijakan perhutanan sosial. Luas lahan yang menjadi objek konflik ini adalah kurang lebih sebesar 3 hektare atau 30.000 meter persegi.

Karena pihak yang diundang belum memberikan respons meskipun sudah dihubungi, nama yang bersangkutan tidak didaftarkan dan tidak tercantum dalam permohonan izin perhutanan sosial. Setelah Surat Keputusan (SK) izin perhutanan sosial diterbitkan pada 27 Desember 2022 dengan nomor SK.10285/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022, pihak terkait kemudian menemui ketua KTH Mekar Sari, sehingga mulai terjadi perbedaan pendapat terkait status dan hak pengelolaan lahan. Pihak yang selama ini mengelola lahan hanya dapat menunjukkan surat keterangan ganti rugi tanah garapan yang diterbitkan oleh kepala desa pada masa itu, sementara menurut ketentuan kehutanan, dokumen tersebut belum dapat diakui. Sebaliknya, pengelolaan diakui apabila didukung SK izin perhutanan sosial. KPH Gedong Wani selaku UPTD tingkat tapak sudah melakukan upaya untuk menangani konflik di Desa Margo Lestari dengan memfasilitasi penyelesaian konflik tenurial yang terjadi di KPH. Akan tetapi, permasalahan tenurial belum dapat terselesaikan.

Situasi ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan pelaksanaannya di lapangan. Konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik penguasaan lahan dalam aspek sosial yang berakar pada perbedaan klaim terhadap pengelolaan kawasan dan persepsi hak atas tanah antara masyarakat yang mengklaim sebagai hak milik secara turun-temurun dan mengandalkan hak historis melalui surat keterangan ganti rugi tanah garapan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Sari yang memiliki legalitas melalui Surat Keputusan (SK) Izin

Perhutanan Sosial. Konflik di sektor kehutanan semacam ini berpotensi menciptakan kondisi yang tidak kondusif serta menghambat upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konflik yang tidak berhasil diselesaikan dapat memicu kesalahpahaman, hilangnya kepercayaan, munculnya prasangka, bahkan berkembang menjadi kekerasan.

Keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan unit pelaksana Dinas Kehutanan pada tingkat tapak/lapangan, juga turut berperan dalam kelembagaan resolusi konflik kehutanan, di mana KPH merupakan penanggung jawab atas pengelolaan hutan pada tingkat tapak (Fadli & Si, 2017). Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa KPH bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan yang meliputi pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan termasuk penanganan konflik tenurial sebagai salah satu kegiatan perlindungan hutan. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, peran KPH menjadi semakin signifikan, terutama dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan tata kelola pengelolaan hutan. Fungsi-fungsi fasilitasi ini menjadi aspek penting untuk dioptimalkan, termasuk dalam upaya resolusi dan pencegahan munculnya potensi konflik baru di wilayah kelola KPH. Di situasi seperti ini, KPH memiliki keterlibatan langsung dalam menangani konflik di wilayah kelolanya dikarenakan jika masalah konflik tenurial tidak ditangani segera, hal itu akan menghambat operasional KPH (Golar dkk., 2022). Keberhasilan KPH dalam merespons, menghadapi, dan mengelola konflik merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan berkelanjutan. KPH harus memastikan bahwa wilayah kelolanya bebas dari permasalahan konflik terutama konflik tenurial (Sahide *et al.*, 2020). Oleh karena itu, sebuah organisasi harus merancang strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat (Caroline, 2019).

Penelitian ini relevan dengan Administrasi Negara karena berkaitan dengan tata kelola sumber daya hutan oleh pemerintah, khususnya melalui strategi Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menangani konflik tenurial di kawasan hutan. Konflik tenurial yang terjadi di Desa Margo Lestari mencerminkan tantangan dalam administrasi publik, terutama dalam manajemen strategi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dari perspektif administrasi negara, penelitian ini mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi strategi penanganan konflik, efektivitas birokrasi kehutanan, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi konflik lahan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menyoroti pengelolaan hutan sebagai bagian dari kebijakan publik, tetapi juga menganalisis bagaimana Administrasi Negara berperan dalam menciptakan keberlanjutan pengelolaan hutan melalui manajemen strategi yang efektif. Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Penanganan Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Di Desa Margo Lestari (Studi Pada KPH Gedong Wani, Lampung Selatan).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi strategi Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani dalam penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan di Desa Margo Lestari?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi strategi penanganan konflik tenurial Di Desa Margo Lestari yang dilakukan oleh KPH Gedong Wani?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan implementasi strategi yang dilakukan oleh KPH Gedong Wani dalam penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam implementasi strategi penanganan konflik tenurial yang terjadi di Desa Margo Lestari.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah wawasan bagi pengembangan keilmuan Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan konsep strategi konflik tenurial.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya yang terlibat, khususnya UPTD KPH Gedong Wani dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi penanganan konflik tenurial untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di lapangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka acuan untuk memperkaya teori yang digunakan terhadap kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bedasari dkk. (2022), Strategi Dinas Kesehatan dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)	Penelitian berfokus pada analisis strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program tersebut. Studi ini dilakukan di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh David (2015) yang mencakup tiga tahapan utama dalam strategi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka stunting di Desa Pongkar. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar belum berjalan secara optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai stunting, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta kurangnya kompetensi, wawasan, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinkes dalam menangani permasalahan stunting. Selain itu, hambatan lainnya meliputi keterbatasan alokasi anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya sosialisasi program, sehingga masyarakat secara umum tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait program pencegahan dan penanganann stunting
2.	Rapa dkk (2021), Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Mamasa dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum besar penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mamasa pada tahun 2019 telah terlaksana dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan.

- | | | |
|---|---|---|
| <p>Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Mamasa</p> | <p>menggunakan tiga indikator implementasi strategi yaitu program, anggaran, dan prosedur.</p> | <p>Strategi yang diterapkan dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Mamasa mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamasa Tahun 2016–2021. Strategi tersebut mencakup percepatan pemenuhan perumahan yang tidak layak huni, dan perwujudan kawasan bebas kumuh.</p> |
| <p>3. Asmaria & Sandika (2019), Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi kemacetan Llau Lintas Berbasis <i>Area Traffic control System</i> di Kota Bandar Lampung</p> | <p>Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui startegi Dinas Perhubungan dalam penerapan APILL pada sistem pengaturan alli lintas kawasan di Kota bandar Lampung dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota bandar lampung. Penelitian ini menggunakan teori dari Higgins yang memiliki tiga indikator yaitu perencanaan integral dan sistem pengendalian; Kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi; manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Perhubungan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik namun masih terdapat aspek penghambat dalam Strategi Dinas Perhubungan dalam Penerapan Alat Pemberi Lalu Lintas Berbasis Sistem Pengaturan Lalu Lintas Daerah di Kota Bandar Lampung. Belum adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat umum. Selain keterbatasan anggaran dan mahalnya biaya pemasangan sistem pengaturan lalu lintas daerah, pengembangan dan penambahan aplikasi sistem pengaturan lalu lintas daerah di Kota Lampung belum dapat terlaksana secara maksimal. Sistem komunikasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan Kota Lampung dengan pegawai yang menangani sistem pengaturan lalu lintas sudah terjalin dengan baik namun komunikasi eksternal dengan pihak terkait belum terjalin dengan baik.</p> |
| <p>4. Utami, A (2018), Implementasi Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Mengantisipasi Potensi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar lampung</p> | <p>Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas melalui sistem implementasi strategi menurut Higgins yang terdiri dari tiga komponen utama diantaranya 1)Perencanaan integral dan sistem pengendalian, 2)Kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi, 3) Manajemen SDM dan kultur organisasi.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung telah cukup efektif dalam mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas. Strategi tersebut dirumuskan dalam bentuk program yang mencakup berbagai kegiatan, antara lain pemasangan rambu lalu lintas jenis standar, rambu <i>over head</i>, serta rambu pendahulu petunjuk jalan, pemeliharaan marka jalan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas serta angkutan jalan, serta inspeksi terhadap sarana dan prasarana keselamatan jalan.</p> |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2.2 Manajemen Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos* yang merupakan gabungan dari *stratos* (tentara) dan *ego* (pemimpin). *Stratos* yang artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan yang pada awalnya digunakan dalam konteks militer. Menurut Glueck dan Jauch dalam Yatminiwati (2019), strategi didefinisikan sebagai sebuah rencana yang terintegrasi, luas, dan menyeluruh, yang menghubungkan keunggulan strategis suatu organisasi dengan tantangan yang ada di lingkungan eksternalnya. Strategi ini dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan utama organisasi melalui pelaksanaan yang efektif dan tepat.

Strategi merupakan respons secara menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Steiner & Miner dalam Taufik, 2024). Sementara itu, Hamel dan Prahalad dalam Dalihade, dkk (2022) menambahkan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan pandangan tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan strategi umumnya dimulai dengan memproyeksikan "apa yang dapat terjadi" daripada berfokus pada "apa yang telah terjadi".

2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut Hermawan & Sriyono (2020), manajemen strategi terbentuk dari dua kata yaitu manajemen dan strategi, di mana strategi adalah suatu metode yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta menyesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sedangkan manajemen adalah seni dalam mengelola berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan individu maupun tugas yang harus diselesaikan. Susanto (2014) dalam Purwaningsih dkk (2023) menyatakan manajemen strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi serta memilih metode untuk mencapainya melalui perumusan strategi dan implementasi strategi yang terencana dan sistematis.

Sementara itu, David (2015) mengartikan manajemen strategi sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi berbagai keputusan yang memungkinkan suatu perusahaan mencapai tujuannya.

Manajemen strategi merupakan proses manajerial yang berulang dalam suatu organisasi untuk menciptakan nilai dalam menyampaikan dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan dan pihak lainnya (Aime Heene & Sabastian, 2010 dalam Sumarsid dkk, 2023). Wheelen dan Hunger (2003) dalam Priatin & Humairoh (2023) juga menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang berperan dalam menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi.

2.2.1 Proses Manajemen Strategi

Proses manajemen strategi mencakup serangkaian tahapan penting yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. David (2004) dalam Sumarsid dkk (2023) mengklasifikasikan proses manajemen strategi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap awal pada manajemen strategi. Hal ini mencakup berbagai kegiatan meliputi merumuskan visi misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman internal, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, mengembangkan alternatif strategi, serta memilih strategi yang sesuai untuk diterapkan.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahapan kedua manajemen strategi setelah merumuskan strategi yang ditetapkan. Tahapan ini menuntut organisasi untuk menetapkan sasaran tahunan, merancang kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, pembentukan struktur organisasi yang efektif, penyesuaian strategi pemasaran, penyusunan anggaran,

pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi, dan mengaitkan sistem kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

3. Evaluasi Strategi

Tahapan ini merupakan langkah terakhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi mencakup tiga kegiatan utama, yaitu meninjau kembali faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar perumusan strategi saat ini, mengukur kinerja, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan, evaluasi strategi sangat penting karena keberhasilan saat ini tidak dapat menjamin kesuksesan di masa depan.

2.2.2 Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahap lanjutan dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi strategi adalah proses mengubah strategi menjadi tindakan nyata dalam organisasi melalui perancangan dan struktur organisasi, perencanaan sumber daya, serta pengelolaan perubahan strategi dalam organisasi (Pella dkk, 2013). Berikut ini beberapa indikator implementasi strategi menurut para ahli:

1. Implementasi Strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006)

a. Perencanaan Integral dan Sistem Pengendalian

Sasaran yang hendak dicapai melalui suatu strategi dijabarkan secara rinci, kemudian disusun dalam bentuk perencanaan antara dan perencanaan operasional. Perencanaan antara, yang juga dikenal sebagai program berfungsi sebagai penghubung antara sasaran strategis dan perencanaan operasional. Program ini mencakup cakupan yang luas, memiliki jangka waktu yang memadai, bersifat komprehensif, serta disusun secara terperinci, peran utama program adalah menerjemahkan strategi ke dalam tugas operasional, sedangkan perencanaan operasional bertujuan untuk mengkonversi output sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Anggaran yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan perencanaan operasional terhadap target organisasi dapat diukur secara sistematis.

b. Kepemimpinan, Motivasi, dan Sistem Komunikasi

Gaya kepemimpinan memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan

menggerakkan anggota organisasi menuju keberhasilan. Seorang manajer perlu memiliki kemampuan untuk memotivasi seluruh jajaran pegawai agar organisasi dapat berkembang secara optimal. Selain itu, sistem komunikasi yang efektif juga menjadi faktor krusial dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi

Komponen implementasi dalam suatu organisasi umumnya dikelola oleh bagian personalia yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, mengelola perekrutan, seleksi, dan penempatan karyawan atau anggota organisasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan *job description*. Kedua, memastikan keberlangsungan kinerja karyawan setelah mulai bekerja yang meliputi pelatihan dan pengembangan, peningkatan produktivitas, serta penguatan sistem komunikasi organisasi dalam memiliki kemampuan manajemen yang baik.

2. Implementasi Strategi menurut Wheelen dan Hunger (2009) dalam Husna (2018)

a. Program

Program merupakan serangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program berfungsi sebagai rincian kegiatan yang telah dijalankan untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan utama dari program adalah memastikan tindakan yang diambil selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Menurut Wahyuni (2020), program adalah variabel penentu dalam kesuksesan implementasi strategi, karena di dalamnya mencakup rencana dan agenda kegiatan yang akan dijalankan oleh organisasi. Keberhasilan implementasi bergantung pada bagaimana suatu program dirancang dan dilaksanakan secara efektif.

b. Anggaran

Anggaran berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan, di mana dalam implementasi strategi, anggaran mencakup pendapatan dan anggaran beban yang akan dijalankan dalam suatu program atau strategi. Setiap anggaran ini mempengaruhi dalam pencapaian kinerja strategi. Menurut Nafarin dalam Wahyuni (2020), anggaran adalah rencana tertulis yang berkaitan dengan

kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam periode tertentu biasanya dinyatakan dalam satuan moneter. Pendapat ini sejalan dengan Supriyanto (2012) dalam Husna (2018) yang menyatakan bahwa pada suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, umumnya dalam bentuk satuan uang untuk mengatur perolehan dan penggunaan berbagai sumber suatu organisasi pada jangka waktu tertentu.

c. Prosedur

Prosedur yang juga dikenal sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP), merupakan suatu langkah-langkah atau teknik-teknik yang tersusun secara sistematis untuk memberikan panduan rinci dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam implementasi strategi, keberadaan prosedur sangat penting untuk mencapai hasil dan tujuan. Menurut Suharni (2012) dalam Husna (2018) menyatakan bahwa prosedur adalah suatu sistem dan aliran kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur juga mencerminkan cara pelaksanaan suatu pekerjaan berdasarkan tingkatannya.

3. Implementasi Strategi menurut Certo & Peter (1990) dalam Yunus (2016)

a. Menganalisis Perubahan

Perubahan dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dengan melakukan analisis mendalam, organisasi dapat menentukan sejauh mana perubahan yang diperlukan, mulai dari penyesuaian kecil tanpa modifikasi strategi yang signifikan hingga perubahan besar yang mencakup revisi misi organisasi.

b. Menganalisis struktur organisasi

Perubahan strategi organisasi dapat memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi serta peningkatan pada posisi-posisi tertentu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam proses implementasi strategi akan berimplikasi pada restrukturisasi organisasi guna memastikan efektivitas pelaksanaannya.

c. Menganalisis budaya organisasi

Karena budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi strategi, manajemen perlu melakukan analisis untuk menilai

sejauh mana kesesuaian antara strategi yang dirumuskan dengan budaya yang diterapkan dalam organisasi.

d. Menganalisis kepemimpinan

Kepemimpinan dan pemimpin merupakan dua konsep yang berbeda. Kepemimpinan yang efektif dalam organisasi publik, organisasi nirlaba, dan masyarakat merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai individu dengan peran yang beragam apada waktu yang berbeda.

e. Implementasi dan evaluasi strategi

Tahap akhir dalam proses implementasi strategi. Pada tahap ini, manajemen harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diharapkan, baik dalam aspek struktur organisasi, budaya organisasi, maupun gaya kepemimpinan.

Berdasarkan beberapa indikator implementasi strategi yang dikemukakan, peneliti menggunakan konsep implementasi strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006) dengan tiga indikator yaitu: (1) perencanaan integral dan sistem pengendalian; (2) kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi; (3) manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi. Alasan peneliti menggunakan implementasi strategi menurut Higgins karena konsep ini menawarkan suatu sistem implementasi yang dianggap akan mampu mengatasi berbagai masalah dalam penerapannya. Selain itu, indikator yang digunakan lebih luas bukan hanya membahas secara teknis saja, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek menajerial dan sosial dalam implementasi strategi.

2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disebut KPH didefinisikan sebagai wilayah pengelolaan hutan yang disesuaikan dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH berdasarkan fungsi terdiri dari KPH

Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP), antara lain:

1. KPH Konservasi (KPHK), KPH yang sebagian besar atau seluruh wilayahnya terdiri dari kawasan hutan konservasi. KPHK ditugaskan untuk menjaga biodiversitas dan lingkungan alami yang meliputi Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan Taman Buru, dan lain-lain.
2. KPH Lindung (KPHL), KPH yang sebagian besar atau seluruh wilayahnya terdiri dari kawasan hutan lindung. KPHL berfungsi sebagai hutan lindung yang menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menjaga ketersediaan air dan kontrol erosi.
3. KPH Produksi (KPHP), KPH yang sebagian besar atau seluruh wilayahnya terdiri dari kawasan hutan produksi. KPHP berfokus pada produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kehutanan Indonesia yang semakin memprihatinkan adalah menggunakan konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kondisi ini ditandai dengan peningkatan laju degradasi hutan, penurunan investasi dalam kehutanan, kemajuan dalam pembangunan hutan tanaman, kurangnya pengendalian terhadap *illegal logging* dan perdagangan ilegal, penurunan perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya area hutan yang tidak terawat.

KPH memiliki tujuan yang jelas dalam mengelola aspek ekonomi, sosial, dan ekologi yang dituangkan dalam pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan, serta perencanaan usaha. Kegiatan operasional dan administrasi KPH diatur berdasarkan tujuan pengelolaan jangka panjang tersebut, serta disesuaikan dengan peran apara pengelola hutan termasuk komersial, masyarakat setempat, dan perusahaan hutan milik negara yang beroperasi di kawasan hutan. Secara sederhana, KPH merupakan unit pelaksana teknis dinas yang ada di tingkat tapak dan tersebar pada seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan memastikan semua fungsi dan layanan hutan di wilayah tetap berjalan dan pengelolaan hutan lestari dapat diterapkan dengan baik. Provinsi Lampung memiliki 17 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang mengelola tata hutan di setiap wilayahnya. Dari

total kawasan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi Lampung, sekitar 488.359 hektare (86,44%) termasuk dalam kategori blok yang dapat dimanfaatkan, baik melalui perizinan berusaha maupun perhutanan sosial (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2024).

2.4 Konflik tenurial

Secara harfiah, istilah tenurial berasal dari kata “*tenure*” yang berasal dari bahasa latin “*tenere*” yang berarti memelihara, memegang, dan memiliki dua perspektif mengenai tenurial. Pertama, konsep hak milik pribadi dipelopori oleh John Locke dan kedua, konsep kepemilikan bersama (komunal) yang dijelaskan oleh Jean Bodin dan George Jelinek (Diantoro, 2020). Menurut Larson (2013), tenurial merujuk pada substansi atau esensinya dari hak dan jaminan atas hak. Konsep ini mencakup situasi di mana terdapat hak yang saling tumpang tindih yaitu ketika dua pihak atau lebih mengklaim terhadap sumber daya yang sama. Sehubungan dengan itu, ia menambahkan bahwa hak tenurial dapat dijelaskan melalui dua perspektif yaitu *de jure* dan *de facto*. Hak menurut undang-undang atau *de jure* mengacu pada aturan formal yang ditetapkan dan dilindungi oleh negara, seperti bukti kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsesi, peraturan perundang-undangan tentang kehutanan). Hak *de facto* berkaitan pada pola interaksi yang berkembang di luar kerangka hukum formal. Sementara itu, hak *de facto* berkaitan dengan pola interaksi yang berkembang di luar kerangka hukum formal, seperti hak ulayat, yaitu aturan dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, diterima, ditafsirkan ulang, serta diterapkan oleh masyarakat, yang mungkin diakui atau tidak diakui oleh negara.

Pemisahan hak dan kewajiban yang tidak seimbang atau tidak saling timbal balik dalam hal penguasaan, kepemilikan, dan pengelolaan sumber daya hutan sering kali menjadi pemicu berbagai konflik sumber daya hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik tenurial di dalam kawasan hutan dinyatakan, konflik tenurial merupakan segala bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Pihak-pihak yang berkonflik berupaya mempertahankan klaim hak penguasaan, pemilikan dan pengelolaan atas sumber daya hutan yang diyakini sebagai hak yang dapat

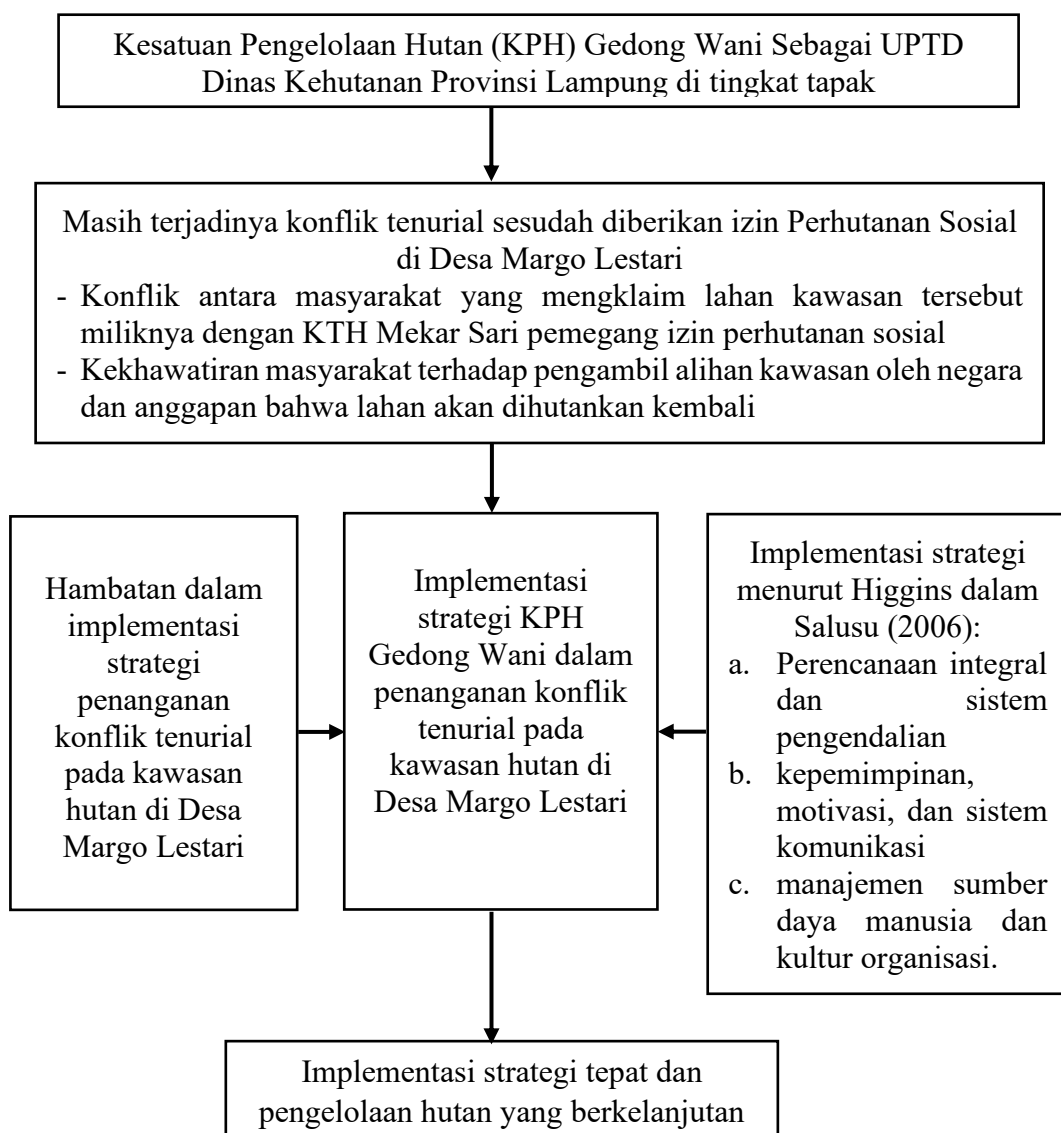
diperolehnya (Nur, 2014 dalam Munawar, 2018). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu cara penyelesaian konflik tenurial adalah melalui program perhutanan sosial. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam pengelolaan serta pemanfaatan kawasan hutan. Perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui berbagai skema, seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

2.5 Kerangka Pikir

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Lampung yang memiliki potensi sumber daya hutan yang melimpah. Pengelolaan kawasan hutan di wilayah ini berada di bawah tanggung jawab Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani, yang berperan sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. KPH Gedong Wani memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam pengelolaan hutan, termasuk di wilayah administrasi Desa Margo Lestari. Meskipun telah diterbitkan izin perhutanan sosial sebagai izin pengelolaan kawasan, dalam wilayah kerja KPH Gedong Wani masih ditemukan permasalahan konflik tenurial, sebagaimana terjadi di Desa Margo Lestari, Kabupaten Lampung Selatan. Konflik ini terjadi antara masyarakat yang mengklaim kawasan hutan sebagai miliknya dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Sari. Masyarakat tersebut meyakini bahwa lahan yang mereka kuasai atau kelola merupakan tanah warisan atau miliknya dari tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, KTH Mekar Sari menyatakan bahwa lahan tersebut secara sah merupakan bagian dari kawasan hutan yang telah diberikan izin pengelolaannya kepada kelompok melalui Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.

Konflik yang muncul dalam sektor kehutanan seperti ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial serta menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dari KPH Gedong Wani untuk merumuskan dan menerapkan strategi penanganan konflik yang tepat. Strategi tersebut harus mampu meredam potensi perpecahan

serta meminimalisir polemik di tengah masyarakat, sehingga proses penyelesaian konflik dapat berjalan secara konstruktif dan mendukung terciptanya keharmonisan sosial serta keberlanjutan pengelolaan hutan. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006) yang menawarkan suatu sistem implementasi yang dianggapnya akan mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam pelaksanaannya yaitu melalui 3 indikator utama meliputi: (1) perencanaan integral dan sistem pengendalian; (2) kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi; (3) manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi.



Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih karena untuk memahami fenomena yang spesifik dalam konteks nyata. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam, dengan fokus pada makna, persepsi, dan interpretasi subjektif dari partisipan atau subjek penelitian (Straus dan Corbin, 2003). Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif merupakan proses inkuiri yang bertujuan untuk memahami suatu hal dengan mengumpulkan data, informasi, dan pandangan dari responden menggunakan berbagai metodologi, khususnya dalam konteks masalah atau fenomena sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dapat berfokus dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

1. Fokus pertama dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi strategi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani dalam penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari dengan menggunakan implementasi strategi menurut Higgins dalam Salusu (2006), yaitu:

- a. Perencanaan integral dan sistem pengendalian

Mendeskripsikan bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam bentuk rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tersebut diimplementasikan yang didalamnya dijelaskan secara rinci terkait program, anggaran, sasaran, operasional, dan sistem pengendaliannya yang ingin dicapai oleh strategi tersebut dalam menangani konflik tenurial di Desa Margo Lestari.

- b. Kepemimpinan, motivasi, dan sitem komunikasi
Melihat bagaimana kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi, baik di internal maupun eksternal KPH Gedong Wani dalam menangani konflik tenurial di desa Margo Lestari.
 - c. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan kultur organisasi
Menganalisis pengelolaan sumber daya manusia mencakup pelatihan dan penguatan kapasitas personil dan budaya organisasi yang mendukung kinerja dalam penanganan konflik tenurial.
2. Fokus kedua pada penelitian yaitu mengetahui faktor penghambat dalam implementasi strategi penanganan konflik tenurial Di Desa Margo Lestari yang dilakukan oleh KPH Gedong Wani

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah di mana penelitian dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas lingkup penelitian, sehingga informasi yang didapatkan mampu mengungkap, menjawab, dan menggambarkan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini di lakukan di KPH Gedong Wani dan Desa Margo Lestari karena lokasi ini merupakan unit pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di tingkat tapak yang memfasilitasi penanganan konflik yang terjadi di Desa Margo Lestari dan Desa Margo Lestari yang menjadi objek penelitian.

2. Jadwal Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti merancang waktu kegiatan penelitian yang berlangsung kurang lebih enam bulan, mulai dari bulan Desember 2024 hingga Juni 2025. Rincian jadwal dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2024			2025			
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Pengumpulan Data							
4.	Analisis Data							

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini mencakup semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan, dan dipilih oleh peneliti. Berbagai sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata hingga yang lebih samar, serta mulai dari yang primer hingga sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara. Pada penelitian ini data primer yang dikumpulkan merupakan informasi dari sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan dan memiliki pemahaman langsung terkait masalah yang akan diteliti. Dengan wawancara dengan informan dan observasi, peneliti memperoleh pemahaman mendalam terkait strategi yang digunakan Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam menangani konflik tenurial.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, namun didapat dari referensi yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berupa dokumen dan informasi tertulis yang telah diolah sebelumnya. Terdapat beberapa sumber data yang digunakan sebagai informasi tambahan, yaitu peraturan menteri, peraturan daerah, artikel, jurnal, situs resmi pemerintah, ataupun data lainnya yang selaras dan mendukung penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Bagian krusial dari sebuah penelitian adalah tahapan pengumpulan data, yang merupakan proses memperoleh informasi yang diperlukan untuk studi tersebut. Pengumpulan data dalam konteks penelitian ilmiah melibatkan proses yang terstruktur untuk mendapatkan informasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, antara lain:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan jawaban antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, wawancara dapat dilakukan secara virtual melalui media telekomunikasi tanpa perlu bertatap muka langsung. Esensinya, wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu atau topik yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai proses verifikasi terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya melalui metode lainnya (Rahardjo, 2011).

Tabel 4. Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan	Informasi
1.	Zulhaidir, S.P., M.Si.	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanann Prov. Lampung	Strategi Penanganan konflik tenurial dan hambatan penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari
2.	Dwi Maylinda, S.Hut, M.Si.	Kepala UPTD KPH Gedong Wani	Strategi Penanganan konflik tenurial dan hambatan penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari
3.	Tommy Dacosta, S.P., M.M.	Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat	Strategi Penanganan konflik tenurial konflik tenurial dan hambatan penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari
4.	Lela Suryana	Penyuluh Kehutanan	Kronologi dan penyebab konflik terjadi Strategi Penanganan konflik tenurial konflik tenurial dan hambatan penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari
5.	Sutrisno	Ketua KTH Mekar Sari sekaligus Kepala Dusun 4 Desa Margo Lestari	Kronologi dan penyebab konflik terjadi Strategi Penanganan konflik tenurial konflik tenurial dan hambatan penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari
6.	Sonjaya, S.Hut	Kepala Desa Margo Lestari	Strategi Penanganan konflik tenurial konflik tenurial dan hambatan penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari

No.	Nama Informan	Jabatan	Informasi
7.	Abdul	Bhabinkatibmas Polsek Jati Agung	Komunikasi yang dilakukan dalam penanganan konflik tenurial
8.	Hamzah	Polhut KPH Gedong Wani	Strategi Penanganan konflik tenurial dan hambatan penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara mendasar, observasi melibatkan penggunaan indra manusia, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil observasi dapat mencakup aktivitas, kejadian, objek, kondisi, suasana, dan bahkan perasaan emosi individu. Tujuan utama dari observasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian (Rahardjo, 2011).

Tabel 5. Objek Penelitian

No.	Tempat	Data
1.	Kawasan Hutan Gedong Wani, Desa Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Mengamati secara mendalam objek penelitian yang menjadi konflik tenurial dari segi geografis, ekonomi, dan sosial.
2.	Kantor KPH Gedong Wani	Data Geografi dan Demografi

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan memperoleh data dan informasi melalui dokumen-dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang seperti arsip dokumen, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan konflik tenurial di Desa

Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 6. Daftar Dokumen

No.	Dokumen	Data yang didapat
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan	Tentang kehutanan mengenai pemanfaatan hutan
2.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021	Tentang perhutanan sosial
3.	RPHJP KPH Gedong Wani Provinsi Lampung Tahun 2024-2033	Mengenai perencanaan antara (program) dan sub kegiatan untuk penanganan konflik tenurial
4.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009	Mengenai tata ruang wilayah di Provinsi Lampung
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Mengenai tanggung jawab terhadap pengelolaan hutan
6.	Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan	Definisi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
7.	Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2019-2024	Mengenai strategi induk yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8.	Pedoman Penanganan Konflik Tenurial Dalam Areal Perhutanan Sosial	Panduan pelaksanaan operasional untuk penanganan konflik tenurial

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Tresiana (2019), analisis data kualitatif adalah suatu proses penyusunan data sehingga dapat diinterpretasikan dengan tepat. Kegiatan ini melibatkan penyusunan data ke dalam pola, tema, atau kategori tertentu, serta menafsirkan makna dari data tersebut dengan menjelaskan pola atau kategori yang muncul dan mengidentifikasikan hubungan antara konsep-konsep yang ada. Selain itu, interpretasi data juga mencerminkan perspektif atau pandangan peneliti terhadap hasil analisis tersebut. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini melibatkan aktivitas utama yang berlangsung secara

terus-menerus dan saling berinteraksi yaitu:

1. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yang melibatkan semua kegiatan yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan.
2. Tahap kedua merupakan reduksi data, yang mencakup proses seleksi, penyaringan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari berbagai catatan dan dokumen lapangan.
3. Tahap ketiga adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun informasi terstruktur untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap ini mencakup penyajian narasi berdasarkan kategori dan pola tertentu sesuai pandangan informan.
4. Tahap terakhir adalah pembuatan kesimpulan, di mana hasil penelitian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang signifikan, baik dalam bentuk narasi maupun pola tertentu berdasarkan pandangan informan. Kesimpulan ini didasarkan pada rangkaian wawancara dan dokumentasi hasil penelitian, dan diwujudkan dalam teks naratif.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bergantung pada validitas data yang dikumpulkan. Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dalam penelitian non-kualitatif. Kriteria ini bertujuan untuk melakukan proses inkuiri secara cermat sehingga tingkat kepercayaan terhadap temuan dapat tercapai dan hasil penelitian dapat dibuktikan oleh peneliti melalui fakta-fakta yang ada. Lincoln & Guba (1985) dalam Subadi (2006) menjelaskan bahwa hasil penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria uji keabsahan data, yaitu: kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas bertujuan untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap data yang dihasilkan dan memastikan validitas data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan menggunakan derajat kepercayaan dengan menerapkan triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan hasil data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada sumber yang berbeda dengan

waktu dan alat yang berbeda pula. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan aspek-aspek yang spesifik.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Transferability merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau ditransfer ke situasi atau konteks lain di luar lingkungan penelitian awal. Dalam konteks penelitian kualitatif, transferabilitas menunjukkan sejauh mana temuan dan kesimpulan dari penelitian tersebut relevan dan dapat digeneralisasi ke populasi atau situasi yang serupa namun berbeda. Jadi, transferabilitas membahas tentang seberapa relevan dan dapat dipindahkan hasil penelitian ke konteks atau situasi lain, dan seberapa mudah orang lain dapat mengaplikasikan temuan tersebut dalam konteks mereka sendiri. Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif bertujuan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian dengan baik dan mempertimbangkan kemungkinan penerapannya. Oleh karena itu, peneliti harus menyusun laporan yang sangat rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Teknik ini melibatkan pembuatan laporan yang menyajikan hasil penelitian dengan sangat teliti dan cermat, menggambarkan konteks tempat penelitian dilakukan secara detail. Tingkat keteralihan dapat dicapai melalui laporan yang teliti, rinci, mendalam, dan menggambarkan konteks dengan seakurat mungkin, serta memastikan kesamaan konteks antara peneliti dan pembaca.

3. Uji Keandalan (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2018), audit proses penelitian diperlukan untuk menguji kebergantungan. Terkadang, meskipun peneliti tidak terlibat langsung dalam proses penelitian, mereka masih dapat menyediakan data. Dalam situasi seperti ini, keandalan penelitian perlu diuji. Jika tidak ada proses penelitian yang dilakukan tetapi data masih tersedia, maka penelitian tersebut tidak dapat dianggap dapat diandalkan. Dalam kasus semacam ini, dependabilitas penelitian diuji, dan penulis secara terus-menerus berdiskusi dengan pembimbing untuk memastikan kebenaran hasil penelitian.

4. Uji Kepastian Data (*Confirmability*)

Kepastian data, atau *confirmability*, mencakup pengujian hasil penelitian dengan kaitannya pada proses yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut, sehingga tidak terjadi situasi di mana hasil ada tetapi prosesnya tidak ada. Untuk mencapai derajat ini diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap semua komponen dan proses penelitian, termasuk hasilnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing meliputi kepastian asal-usul data, analisis logika dalam penarikan kesimpulan yang diambil dari data, evaluasi tingkat ketelitian, serta penilaian terhadap keabsahan data yang telah disajikan. Dalam hal ini, pembimbing skripsi bertanggung jawab untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai strategi KPH Gedong Wani dalam penanganan konflik tenurial di Desa Margo Lestari dengan menggunakan teori implementasi strategi menurut Higgins maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi strategi dilakukan oleh KPH Gedong Wani belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu perencanaan integral dan sistem pengendalian; kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi; serta manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi.

- a. Perencanaan Integral dan sistem pengendalian

Strategi KPH Gedong Wani telah dirumuskan melalui dokumen renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan diturunkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Gedong Wani yang memuat kegiatan identifikasi dan penyelesaian konflik tenurial. Pelaksanaan di lapangan mengacu pada Pedoman Penanganan Konflik Tenurial dalam Areal Perhutanan Sosial dari Dirjen PSKL KLHK, namun masih bersifat situasional dan reaktif terhadap eskalasi kondisi konflik yang terjadi. Dalam implementasinya, perencanaan tersebut belum didukung dengan alokasi anggaran khusus maupun personel khusus. Sistem pengendalian dilakukan melalui mekanisme pelaporan insidental oleh penyuluh kehutanan, tanpa evaluasi berkala atau sistem pengawasan yang sistematis.

- b. Kepemimpinan, motivasi, dan sistem komunikasi

Kepala KPH Gedong Wani menunjukkan gaya kepemimpinan yang situasional. Pemimpin aktif memberikan motivasi kepada pegawai, baik secara moral melalui arahan dan dukungan di lapangan. Sistem komunikasi berjalan efektif baik secara internal melalui rapat, koordinasi langsung, dan media digital bersama petugas lapangan,

maupun secara eksternal melalui sinergi lintas sektor dengan aparat desa dan kepolisian.

c. Manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi

Sumber daya manusia yang dimiliki KPH Gedong Wani terbatas dan belum memiliki tim khusus untuk konflik, namun penanganan dilekatkan pada penyuluh dan polisi kehutanan. KPH aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan lembaga mitra seperti SSF. Kultur organisasi di KPH Gedong Wani memperlihatkan karakter kerja yang adaptif dan penuh solidaritas. Koordinasi cepat bahkan di luar hari kerja, menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

2. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat implementasi strategi, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor dominan dikarenakan KPH Gedong Wani tidak memiliki tim khusus atau tenaga ahli dalam penanganan konflik tenurial dan hanya mengandalkan pegawai yang bertugas atas wilayah binaannya, serta tidak tersedianya anggaran khusus untuk operasional penanganan konflik. Di sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi kehutanan serta belum optimalnya keterlibatan seluruh pihak dalam proses mediasi turut menjadi tantangan tersendiri yang berdampak pada lamanya proses penanganan konflik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan dukungan struktural dan fungsional melalui alokasi khusus untuk mendukung kegiatan penanganan konflik tenurial. Selain itu, penulis menyarankan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang penanganan konflik, baik melalui rekrutmen baru maupun peningkatan kapasitas pegawai yang sudah ada.
2. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai harus dilakukan secara rutin. Pelatihan sebaiknya tidak hanya bersifat teknis kehutanan, tetapi juga meliputi mediasi konflik, hukum pertanahan, dan pendekatan sosial-budaya

masyarakat sekitar hutan.

3. Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi berkala atas konflik tenurial yang muncul dan strategi yang dilaksanakan, serta indikator keberhasilan yang jelas. Pengawasan tidak hanya mengandalkan pelaporan insidental dari penyuluh tetapi perlu desain evaluasi sistematis agar konflik dapat dicegah sejak dini.
4. KPH Gedong Wani perlu menjalin kerja sama dengan lembaga non-pemerintah, akademisi, atau pihak ketiga netral sebagai mediator dalam penanganan konflik yang buntu.
5. Peneliti menyarankan agar KPH melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat sekitar hutan mengenai status kawasan hutan, hak dan kewajiban dalam skema perhutanan sosial, serta sanksi hukum atas klaim ilegal. Ketegasan KPH juga diperlukan dalam menindak pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas akan memberikan kepastian bagi masyarakat pengelola sah dan mencegah potensi konflik berlarut-larut. Hal ini dapat mencegah munculnya konflik baru dan memperkuat legitimasi kelompok pengelola sah seperti KTH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, R. (2023, Jukli). Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan | Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/forestra/article/view/11704>
- Agroindonesia.co.id. (2024, Januari 30). Konflik Lahan Berkepanjangan dan Solusi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Gunung Balak. AgroIndonesia. <https://agroindonesia.co.id/konflik-lahan-berkepanjangan-dan-solusi-rehabilitasi-hutan-dan-lahan-di-gunung-balak/>
- Ardiansyah, M. (2021). Strategi *Program Serve and Protect Integration System* (SPIS) Polresta Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 6(1), 18-35.
- Asep Solikin, H.M Fatchurahman dan Supardi, "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri", *Anterior Jurnal*, Volume 16 Nomor 2, (Juni 2017), h. 92
- Asmaria, A., & Sandika, D. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Kemacetan Lalu Lintas Berbasis Area Traffic Control System Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (E-JKPP)*, 5, 50-62.
- Alobaidan, L., Kee, D. M. H., Hanif, M., Afifi, M., AlFouzan, S., Tan, P. H., ... & Quttainah, M. A. (2020). How Does Situational Leadership Affect Organizational Success? A Study of Honda. *Advances in Global Economics and Business Journal*, 1(1), 26-38.
- Badu, Syamsu Q, and Novianty Djafri. (2017). *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. ed. Ideas. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Bedasari, H., Novita, F., Azmi, Razali, M. T., & Wana, I. S. L. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). *Jurnal Kemunting*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.0506/jkg.v3i2.650>
- Bintoro, D., & Daryanto, D. (2017). Manajemen penilaian kinerja karyawan. *Yogyakarta: Gava Media*, 15.
- Caroline, J. L. (2019). Strategi Komunikasi Expert Tenurial Dan Agraria Perum Perhutani Dalam Menyelesaikan Masalah Tenurial.
- cnnindonesia.com. (2023, Januari 3). KLHK Catat 1.051 Konflik Lahan Selama 2015-2022. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103124915-20-895473/klhk-catat-1051-konflik-lahan-selama-2015-2022>
- Creswell, J. W. (2010). *A. Metodologi Penelitian*. Digilib.ikipgriptk.ac.id.

- Dassir, M. (2008). Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur—Neliti. <https://www.neliti.com/id/publications/8205/resolusi-konflik-pemanfaatan-lahan-masyarakat-dalam-kawasan-hutan-di-kabupaten-l>
- Dalihade, F. R. J., Lopian, M. T., & Lengkong, J. P. (2022). Evaluasi Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pilkada Tahun 2018. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(4), 227-241.
- David, F. R. (2015). Manajemen Strategik. https://www.academia.edu/34858806/Fred_R_David_Manajemen_Strategik_pdf
- Dewantara, Angger. (2020). *Meningkatkan level leadership seorang pemimpin*. DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15086/Meningkatkan-level-leadership-seorang-pemimpin.html>
- Diantoro. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo | Diantoro | Media of Law and Sharia. <https://journal.ummy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/10272>
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2024, Februari 13). Progress Perhutanan Sosial Provinsi Lampung - Progress Perhutanan Sosial Provinsi Lampung. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/progress-perhutanan-sosial-provinsi-lampung>
- Effendy, Onong Uchjana. (1994). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 122.
- Fadli, M., & Si, M. (2017). Kelembagaan Konflik Agraria Dan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Timur.
- Febrian, M. Alan. (2018). Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Melestarikan Bahasa dan Aksara Lampung. Skripsi Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung.
- Golar, G., Muis, H., & Simorangkir, W. S. (2022, Mei 27). *Conflict Variety and the Facilitation Role of Forest Managemen Unit (FMU) on Resolution of Tenurial Conflict*—Neliti. <https://www.neliti.com/id/publications/491720/conflict-variety-and-the-facilitation-role-of-forest-managemen-unit-fmu-on-resol>
- Hermawan, S., & Sriyono. (2020). Buku Ajar Manajemen Strategi & Resiko. Umsida Press, 1–143. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-72-8>
- Huda, A. M., & Martanti, D. E. (2018). Pengantar manajemen strategik. *Jayapangus Press Books*, i-329.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Laporan Kinerja 2023 KLHK. Laporan Kinerja 2023 KLHK. <https://www.menlhk.go.id/work-plan/laporan-kinerja-2023-klhk>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023, Januari 30). PPID | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Menteri LHK: Tata Batas

- Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini! <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini>
- Kurniasih, K. (2021). Pengaruh Komunikasi Internal Dan Komunikasi Eksternal Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management Review*, 5(1), 633-638.
- Larson, A. M. (2013, Juli 5). Hak tenurial dan akses ke hutan: Manual pelatihan untuk penelitian: Bagian I. Panduan untuk sejumlah persoalan utama. CIFOR-ICRAF. <https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/4123/>
- Masruroh, Ana. 2016. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT PG Candi Baru Sidoarjo."
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Usa*: Sage Publications
- Munawar, A. (2018). Konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(2), 257-269.
- Naningsih, N., Handayani, S., Yuniningsih, T., Suriadi, S., Sangkala, M., Kasmawaru, K., ... & Abaharis, H. (2023). MSDM (SDM ERA DIGITAL). *MSDM (SDM ERA DIGITAL)*.
- Nuraeny, T. D. A., Qomar, N., & Kausar, K. (2023). Resolusi konflik tenurial di kawasan hutan Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.11196>
- Pella, M. D. A., Sumarwan, U., & Daryanto, A. (2013). Model Implementasi Strategi sebagai Determinan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Teknologi*.
- Priatin, D. O. E., & Humairoh, H. (2023). Kupas Tuntas Teori Wheelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif. *MANTRA (Jurnal Manajemen Strategis)*, 1(1), 17-25.
- Purwaningsih, P., Mawardi, I., & Usman, N. (2023). Manajemen Strategik Gerakan Sekolah Menyenangkan Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 12-27.
- Rahardian, Bagus Ryan. (2015). "Korelasi Antara Perubahan Organisasi Dengan Stres Kerja Di Divisi Munisi PT. Pindad (Persero) Turen Malang." <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1844> (September 30, 2022).
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Rapa, M. T., Hannan, S., & Andriani, A. (2021). Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Mamasa Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Mamasa. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v5i2.1897>
- Sabir, S. (2023)., *Gaya komunikasi kepala desa dalam manajemen konflik kepentingan di desa bakaru* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Supratman, S., Yusran, Y., Pratama, A. A., Maryudi, A., Runtubei, Y., Sabar, A., Verheijen, B., Wong, G. Y., & Kim, Y.-S. (2020). *Prophets and profits in Indonesia's social forestry partnership schemes: Introducing a sequential power analysis*. *Forest Policy and Economics*, 115, 102160.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan keputusan strategik*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Sari, S. N., & Sari, F. K. (2020). Gaya Kepemimpinan Situasional Di Perpustakaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.41098>
- Sari, W. M. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(1), 149-162.
- Selviani, D., Utoyo, B., & Hutagalung, S. S. (2017). Resolusi Konflik Agraria Di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji) | Administratio. <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/29>
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 29125.
- Soedarso, S. W. (2015). *Sistem Informasi Manajemen*. Manggu Media
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 158-165.
- Sudarmanto, E., et al. (2021). *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsid, E. G., Pangestuti, R. S., & Tartiani, Y. A. T. (2023). *Manajemen Strategi; Pendekatan secara Teori dan Kajian Kasus*.
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 29125. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.4.14>
- Taufik, M. (2024). *Strategi Pemasaran Malikah Bakery Untuk Meningkatkan Brand Awareness= Malikah Bakery Marketing Strategy To Increase Brand Awareness* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tresiana, N. (2019). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Todorović, Z., & Todorović, B. (2020). *Situational Leadership in Service Organizations*. *Acta Economica*, 18(33), 115-129. <https://doi.org/10.7251/ACE2033115T>

- Utami, A. (2018). Implementasi Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Mengantisipasi Potensi Kecelekaan Lalu Lintas Di Kota Bandar lampung.
- Yatminiwati, M. (2019). Manajemen Strategi.
- Yunus, E. (2016). Manajemen Strategi. ANDI
- Yusrizal, M., & Maarif, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Resolusi Kondlik Hutan Pada Kawasan Hutan Negara (Studi Kasus Gunung Balak Register 38 Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Administrativa*, 4(3), 415-428.
- Walujan, Brenda C, Silvy Mandey, and Willem Tumbuan. (2016). “Gaya Kepemimpinan, Delegasi Wewenang, Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan (Pada PT. Air Manado).” *EMBA* 4(5): 489–500.
- Web.lintaslampung.com. (2024, April 25). Sejarah Singkat Konflik Agraria di Register 45 Tak Kunjung Usai, Masyarakat vs Perusahaan Siapa Yang Salah? Lintas Lampung. <https://web.lintaslampung.com/sejarah-singkat-konflik-agraria-di-kawasan-register-45-yang-tak-kunjung-usai-masyarakat-vs-perusahaan-siapa-yang-salah/>
- Winardi.(2016). Manajemen Perilaku Organisasi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.